



Judul : Anggaran Kementerian Teknis Dipangkas : Target Pertumbuhan Bakal Sulit Tercapai
Tanggal : Kamis, 22 September 2016
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 13

Anggaran Kementerian Teknis Dipangkas Target Pertumbuhan Bakal Sulit Tercapai

DPR memanggil Kementerian Badan Usaha Milik Negera (BUMN), Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM), dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) untuk membahas anggaran 2017 di Jakarta, kemarin. Mereka menyangkan anggaran kementerian teknis tersebut dipangkas. Target pertumbuhan ekonomi pun bakal sulit tercapai.

Rapat digelar di ruang Komisi VI DPR. Rapat yang dimulai pukul 10.30 WIB itu dihadiri oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, Menteri Koperasi dan UKM Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, dan Kepala BKPM Thomas Lembong.

Dalam rapat tersebut diputuskan anggaran Kementerian Perdagangan tahun depan Rp 3,5 triliun dari sebelumnya Rp 3,76 triliun, Kementerian Perindustrian Rp 2,94 triliun dari sebelumnya Rp 3,16 triliun, Kementerian Koperasi dan UKM Rp 1,05 triliun dari sebelumnya Rp 1,18 triliun, Kementerian BUMN Rp 243,8 miliar, dan BKPM Rp 564,5 miliar.

Pimpinan sidang yang juga Wakil Ketua Komisi VI DPR, Azam Azman Natawijana mengatakan, hasil rapat akan dibawa ke Badan Anggaran (Banggar) untuk dibahas lebih lanjut dan disepakati secara menyeluruh.

"Kita lihat nanti kalau memungkinkan adanya penambahan anggaran nanti akan dibahas di Banggar," kata Azam.

Anggota Komisi VI DPR

Bambang Haryo mengatakan, dengan dipangkasnya anggaran kementerian teknis, target pemerintah untuk mencapai pertumbuhan ekonomi tahun depan di atas 5 persen sulit tercapai.

"Alih-alih ingin mencapai target pertumbuhan ekonomi tinggi, tapi kebijakannya kontras dengan memotong anggaran," kritik Bambang.

Padahal, kementerian teknis seperti Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan dan Kementerian Koperasi dan UKM menjadi faktor pendorong pertumbuhan ekonomi.

"Contohnya yang parah, Kementerian Koperasi dan UKM. Di 2013, itu anggarannya pernah mencapai Rp 2 triliun, sekarang nggak. Padahal kita punya 5 juta UKM yang akan disosialisasi," ujarnya.

Karena itu, dia berharap pemerintah tidak melakukan pemangkasan anggaran lagi pada tahun depan. Sebab, hal ini bertentangan dengan Nawacita Presiden Joko Widodo untuk membangun dari pinggiran.

Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto menerima anggaran kementeriannya dipotong. "Kemenperin pagunya adalah Rp 3,16 triliun. Tapi penyesuaian pagu anggaran adalah dipotong Rp 226 miliar menjadi Rp 2,94 triliun di 2017," ujar Airlangga.

Namun, kata dia, pihaknya akan mengajukan penambahan anggaran pada saat yang tepat di 2017. "Ini untuk mendukung program prioritas pemerintah. Tambahan anggaran 2017 tidak diajukan pada saat ini, tapi di waktu yang tepat," tutup Airlangga. ■ KPJ